

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI
TERHADAP PELAKU PENYELEWENGAN DANA
BANTUAN SOSIAL BAGI TERDAMPAK *CORONA*
*VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

SKRIPSI



OLEH:

ADIK BISMAR

NPM: 17300022

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI
TERHADAP PELAKU PENYELEWENGAN DANA
BANTUAN SOSIAL BAGI TERDAMPAK *CORONA*
*VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADIK BISMAR
NPM: 17300022

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI
TERHADAP PELAKU PENYELEWENGAN DANA
BANTUAN SOSIAL BAGI TERDAMPAK *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADIK BISMAR
NPM: 17300022

SURABAYA,

MEGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

 
NUR KHALIMATUS S, S.H., M.H. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H

DEKAN


DR. UMI ENGGARYASI, S.H., M.HUM.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI
TERHADAP PELAKU PENYELEWENGAN DANA
BANTUAN SOSIAL BAGI TERDAMPAK *CORONA*
*VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ADIK BISMAR
NPM: 17300022

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 APRIL 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

(KETUA)

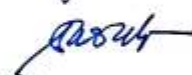
1.



2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.



3. NUR KHALIMATUS S, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.



MOTTO

Menjalani kehidupan butuh **perjuangan** yang sangat keras agar kelak nanti bisa merubah kehidupan menjadi ringan apa yang sudah kita lalui dahulu

“Bismar_KNR”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Nur Khalimatus Sa’diyah, S.H., M.H. dan Septiana Prameswari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih juga untuk Dosen Wali Isetyowati Andayani S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu memberikan arahan dan bimbingan juga sampai tuntas dalam mengerjakan skripsi saya ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Alm. Ayah dan Ibu tercinta, kakak-kakak, serta orang terdekat telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do’a yang tak pernah berhenti.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

ADIK BISMAR

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADIK BISMAR
NPM : 17300022
Alamat : Jl. Makam Peneleh No.37, Surabaya
No. Telp (HP) : 089656595647


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban aktika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 7 Februari 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The signature is written in a cursive style.

ADIK BISMAR

NPM: 17300022

ABSTRACT

*The research entitled *The Application of the Corruption Law Against Perpetrators of Misappropriation of Social Assistance Funds for Those Affected by Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, the first objective is to know, understand and analyze the typology of misappropriation of social assistance funds Covid-19. Second, to find out, understand and analyze whether the perpetrators fraud can be accounted for for violations of the law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption Article 2 paragraph (2).*

The research method used in this thesis uses the method Normative Juridical research which is library research, namely research on legislation and related literature with the material discussed.

Based on the results of the thesis research, it can be concluded that the first is People affected by the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak 19) requires assistance from the Indonesian government. Social assistance that provided by the government, namely basic food assistance, direct cash assistance (BLT) or direct village cash assistance (BLTDes), cash social assistance (BST), free electricity as well as pre-employment cards for people who have difficulty finding work to hone skills. Therefore, the assistance funds that will be given to people who affected by the outbreak, many distributors abuse the aid for the sake of personal interest or a group of people to neglect something obligations as a distributor of COVID-19 social assistance. Second is In accountability for perpetrators who have committed acts the misuse of the COVID-19 social assistance, the perpetrator has the right to fulfill the elements to take responsibility for what has been done in error obtained. So that the perpetrator can be subject to article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which reads "In the case of a criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is carried out under certain conditions, the death penalty can be imposed ", then from that certain circumstances described the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disaster. 19) including non-natural disasters so that the government makes a decision President Number 12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters Spread Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) so from COVID-19 social assistance planned by the government to help the affected communities plague.

Keywords: COVID-19, Social Assistance, Diversion.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana tipologi penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa apakah pelaku penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dapat disimpulkan Pertama yaitu Masyarakat yang terdampak bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membutuhkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah yaitu bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung tunai desa (BLTDes), bantuan sosial tunai (BST), listrik gratis serta kartu prakerja bagi orang yang kesulitan mencari pekerjaan guna mengasah skill. Oleh karena itu dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah, banyak pihak penyalur yang menyalahgunakan bantuan tersebut demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang hingga melalaikan suatu kewajibannya sebagai pihak penyalur bantuan sosial COVID-19. Kedua adalah Dalam pertanggungjawaban bagi pelaku yang telah melakukan tindak penyelewengan bansos COVID-19 maka pelaku tersebut berhak memenuhi unsur untuk melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diperbuat dalam kesalahan yang didapat. Sehingga pelaku tersebut dapat dikenakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ", maka dari itu keadaan tertentu dijelaskan bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk bencana nonalam sehingga pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka dari bantuan sosial COVID-19 direncanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah.

Kata Kunci: COVID-19, Bantuan Sosial, Penyelewengan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	21
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	24
BAB II TIPOLOGI PENYELEWENGAN DANA BANTUAN SOSIAL	
<i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i>	
A. Program Bantuan Sosial Covid-19	26
B. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Covid-19	32
C. Tipologi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19	40

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYELEWENGAN
DANA BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISEASE
MENURUT PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Pertanggungjawaban Atas Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19	43
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56

DAFTAR BACAAN